

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA

PROPOSAL PENULISAN BUKU

SKEMA PENDAMPINGAN

“Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam
Perspektif HAM Internasional Dan Nasional”



Tim Penulis

Penulis 1

Nama Dosen | NIDN : Djamaludin, S.H., M.H.

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Pidana

Penulis 2

Nama Dosen | NIDN : Iryana Anwar, S.H., M.H.

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Pidana

Penulisan buku ini dibiayai dengan Dana DIPA Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua SK Ketua STIH Biak-Papua Nomor: 043/KPTS/STIH-BP/VI/2022 Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Buku Nomor: 001/PRJ/UPPM/STIH-BP/VI/2022 Tanggal 11 Juni 2022

Judul Buku : Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional
Nama Dosen : Djamaludin, S.H., M.H.
Program Studi : Hukum S1
Bidang Keahlian : Pidana

Telepon : (0981) 2911909
Situs Web : www.uppm.stihbiak.ac.id
Alamat : Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111
Email : djamaludin@stihbiak.ac.id

© 2023 Penulis



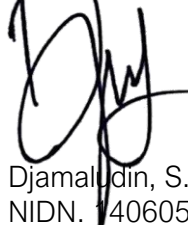
Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional.

LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul Buku	: Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional
2	Penulis/Ketua Tim Penulis *)	
	a. Nama Lengkap dan Gelar	: Djamaludin, S.H., M.H.
	b. NIDN dan Golongan	: 1406059401
	c. Pangkat/JabatanFungsional	: Tenaga Pengajar
	d. Program Studi	: Hukum S1
	e. Bidang Keahlian	: Pidana
4	Spesifikasi dan Keunggulan Buku	: Buku ini mengadopsi pendekatan holistik dalam memahami konsep HAM. Selain membahas HAM dalam konteks hukum internasional, buku ini juga mengeksplorasi implementasi dan adaptasi HAM di tingkat nasional, dengan fokus pada negara Indonesia. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang bagaimana HAM beroperasi dalam kerangka global dan nasional.
5	Jangka Waktu Penyusunan	: 4 (empat) bulan
6	Biaya yang diperlukan	: Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Biak, 13 Juni 2022

Ketua Penulis



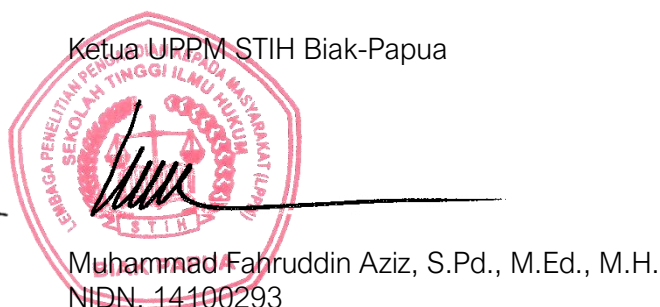
Djamaludin, S.H., M.H.
NIDN. 1406059401

Mengetahui
Ketua STIH Biak-Papua



Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
NIDN. 1208106701

Ketua UPPM STIH Biak-Papua



Muhammad Fahrudin Aziz, S.Pd., M.Ed., M.H.
NIDN. 14100293

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam konteks global yang semakin kompleks ini, pemahaman yang mendalam tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif internasional dan nasional menjadi sangat penting. HAM merupakan prinsip yang menjadi pijakan bagi kehidupan yang adil, demokratis, dan berkeadilan bagi setiap individu di masyarakat. Dalam menghadapi tantangan yang beragam, penelitian tentang konsep HAM dalam perspektif internasional dan nasional memiliki peran yang krusial dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan HAM. Proposal penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif konsep HAM dari perspektif internasional dan nasional. Kami akan melihat bagaimana HAM dipahami dan diimplementasikan dalam kerangka hukum internasional, termasuk instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-konvensi internasional terkait HAM.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi implementasi dan pemenuhan HAM di tingkat nasional, dengan fokus pada konteks negara Indonesia. Kami akan menganalisis perundang-undangan, kebijakan, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi dan memajukan HAM di tingkat nasional. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam implementasi HAM di tingkat nasional serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan HAM di masa depan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui analisis dokumen, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, dan studi komparatif untuk membandingkan praktik HAM di berbagai negara. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis dan disajikan dengan menggunakan kerangka teoritis yang relevan dengan tujuan penelitian.

Kami berharap bahwa proposal penelitian ini dapat diterima dan mendapatkan dukungan untuk dilaksanakan. Melalui penelitian ini, diharapkan kontribusi yang signifikan dapat diberikan dalam pemahaman dan peningkatan perlindungan serta pemenuhan HAM di tingkat internasional dan nasional. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mereka memperkuat sistem perlindungan HAM yang lebih efektif dan inklusif.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi langkah awal yang berarti dalam memajukan pemahaman dan perlindungan HAM di era yang terus berkembang ini.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Biak, 13 Juni 2022

Djamaludin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
SINOPSIS	vii
1. PENDAHULUAN	1
2. METODE PELAKSANAAN	4
3. TIMELINE RENCANA PENULISAN BUKU	5
4. KERANGKA DAN STRUKTUR BUKU	9
Contoh Kerangka/Cuplikan Naskah Buku	10
5. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA	17
6. DAFTAR PUSTAKA	19
7. IDENTITAS PENGUSUL	25
8. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENULIS	26

SINOPSIS

Buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional" adalah panduan komprehensif yang mengupas tuntas konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif internasional dan nasional. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang HAM sebagai dasar kehidupan yang adil, bebas, dan bermartabat. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk menjelajahi konsep HAM dari sudut pandang internasional. Prinsip-prinsip utama HAM, seperti kesetaraan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan penyiksaan, akan dijelaskan dengan teliti. Pembaca juga akan mengenal instrumen-instrumen internasional yang penting dalam perlindungan HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-konvensi HAM internasional lainnya. Buku ini juga memberikan analisis mendalam tentang implementasi HAM di tingkat nasional, dengan fokus pada konteks Indonesia. Pembaca akan mempelajari perundang-undangan, kebijakan, dan lembaga-lembaga yang melindungi dan memajukan HAM di tingkat nasional. Melalui studi kasus yang relevan, buku ini menggambarkan tantangan dan keberhasilan dalam mengimplementasikan HAM di tingkat nasional. Selain itu, buku ini juga menggali isu-isu kontemporer terkait HAM yang sedang berkembang. Dari hak lingkungan hidup hingga perlindungan data pribadi, buku ini menjelaskan bagaimana HAM berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Ditulis dengan gaya jelas dan mudah dipahami, buku ini cocok untuk berbagai pembaca, termasuk mahasiswa, akademisi, aktivis HAM, dan pengambil kebijakan. Buku ini juga memberikan rekomendasi dan panduan praktis bagi pembaca dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM di tingkat internasional dan nasional. Dengan sinopsis yang menarik dan isi yang mendalam, buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep HAM secara komprehensif dan mengenali pentingnya HAM dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan martabat kemanusiaan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Internasional, Nasional

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip universal yang menggarisbawahi martabat, kebebasan, dan keadilan setiap individu di dunia. HAM menjamin hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa diskriminasi apapun. Konsep HAM berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi landasan penting bagi masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Pemahaman dan implementasi HAM dalam perspektif internasional dan nasional menjadi sangat penting untuk menjaga dan memperkuat perlindungan HAM di tingkat global maupun nasional. Dalam konteks HAM internasional, negara-negara diharapkan untuk mematuhi dan memajukan HAM sebagai tanggung jawab mereka terhadap warga negara dan masyarakat internasional. Instrumen-instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, dan Konvensi-konvensi HAM internasional lainnya, telah menjadi landasan hukum yang penting dalam melindungi dan memajukan HAM di tingkat global. Prinsip-prinsip HAM yang termaktub dalam instrumen-instrumen ini mencakup kesetaraan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan penyiksaan.

Namun, implementasi HAM di tingkat nasional melibatkan tantangan yang unik dan kompleks. Setiap negara memiliki konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda yang memengaruhi pemahaman dan implementasi HAM di dalamnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana konsep HAM diinterpretasikan dan diadaptasi dalam konteks nasional, serta mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan yang terkait. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang beragam budaya, agama, dan etnisitas, pemahaman dan implementasi HAM di tingkat nasional memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan HAM yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap HAM melalui berbagai kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan HAM di dalam negeri. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan HAM di Indonesia masih relevan dan perlu diteliti secara mendalam.

Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep HAM dalam perspektif internasional maupun nasional. Namun, terdapat kebutuhan yang terus berkembang untuk penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang implementasi dan pemenuhan HAM di tingkat nasional, dengan mempertimbangkan isu-isu kontemporer yang sedang berkembang. Penelitian yang mendalam tentang pemahaman, implementasi, dan tantangan HAM dalam perspektif internasional dan nasional akan memberikan wawasan yang

berharga bagi perkembangan dan perbaikan sistem perlindungan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep HAM dalam perspektif HAM internasional dan nasional, dengan fokus pada pemahaman, implementasi, dan tantangan yang dihadapi di tingkat nasional. Melalui penelitian ini, kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana konsep HAM dipahami dalam perspektif internasional dan bagaimana prinsip-prinsip HAM diimplementasikan di tingkat global?
- 2) Bagaimana konsep HAM diinterpretasikan dan diadaptasi dalam konteks nasional, khususnya di Indonesia?
- 3) Apa saja tantangan dan keberhasilan yang terkait dengan implementasi HAM di tingkat nasional?
- 4) Bagaimana isu-isu kontemporer mempengaruhi pemahaman dan implementasi HAM di tingkat internasional dan nasional?

Dalam menganalisis pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui analisis dokumen, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, dan studi komparatif. Analisis dokumen akan melibatkan tinjauan literatur akademik dan sumber-sumber yang relevan, termasuk instrumen-instrumen HAM internasional, perundang-undangan nasional, kebijakan, laporan, dan studi kasus terkait. Wawancara akan dilakukan dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi HAM di tingkat nasional, seperti perwakilan lembaga pemerintah, LSM, dan akademisi. Studi komparatif akan dilakukan untuk membandingkan praktik HAM di negara-negara lain dengan konteks yang serupa. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep HAM dalam perspektif HAM internasional dan nasional, khususnya di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam perlindungan dan pemajuan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam proposal penelitian ini, kami akan menguraikan langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan penelitian, seperti pengumpulan data, analisis data, dan presentasi hasil penelitian. Kami juga akan menjelaskan relevansi penelitian ini dengan konteks saat ini, serta potensi dampaknya dalam menghasilkan perubahan positif dalam perlindungan dan pemajuan HAM. Kami berharap bahwa proposal penelitian ini dapat diterima dan mendapatkan dukungan untuk dilaksanakan. Melalui penelitian ini, diharapkan kontribusi yang signifikan dapat diberikan dalam pemahaman dan peningkatan perlindungan serta pemenuhan HAM di tingkat internasional dan nasional. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan panduan bagi pengambil

kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mereka memperkuat sistem perlindungan HAM yang lebih efektif dan inklusif.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan penulisan buku “Memahami Konsep Hak Asasi Dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional” akan melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis. Berikut adalah beberapa tahapan utama yang akan diikuti dalam pelaksanaan buku:

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi: Tahap pertama adalah melakukan penelitian mendalam untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan terkini tentang konsep HAM dalam perspektif internasional dan nasional. Ini melibatkan studi literatur akademik, analisis dokumen hukum dan kebijakan terkait HAM, serta mengikuti perkembangan terkini dalam diskursus HAM baik di tingkat internasional maupun nasional.
2. Penentuan Struktur dan Kerangka: Setelah pengumpulan informasi, tahap berikutnya adalah menentukan struktur dan rangkaian isi buku. Ini melibatkan merancang bab-bab dan subbab yang sesuai untuk menjelaskan konsep HAM, prinsip-prinsipnya, instrumen-instrumen internasional yang terkait, implementasi HAM di tingkat nasional, dan isu-isu kontemporer yang relevan. Struktur yang jelas dan terorganisir akan membantu dalam penyampaian informasi dengan baik kepada pembaca.
3. Penulisan Awal: Setelah struktur ditentukan, penulisan bab-bab dan subbab dilakukan dengan memperhatikan alur logis dan koherensi. Setiap bab akan menjelaskan konsep HAM dalam konteks internasional atau nasional secara rinci, menggunakan bukti dan contoh konkret untuk mendukung argumen yang disampaikan. Penulisan akan dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan menghindari jargon yang berlebihan. Selama proses penulisan, akan dibuat daftar referensi yang teratur dan terperinci untuk mengakui dan memberikan kredit pada sumber informasi yang digunakan. Referensi akan mencakup literatur akademik, dokumen hukum, kebijakan, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.
4. Revisi dan Penyuntingan: Setelah penulisan selesai, akan dilakukan peninjauan dan penyuntingan menyeluruh untuk memastikan kesesuaian, kejelasan, dan konsistensi tulisan. Tahap ini melibatkan pengecekan tata bahasa, tanda baca, ejaan, serta pembenaran argumen dan keabsahan informasi yang disajikan. Jika perlu, perbaikan dan penyempurnaan akan dilakukan untuk memastikan kualitas tulisan yang baik. Tahap selanjutnya adalah merancang desain dan tata letak buku. Desain yang menarik dan profesional akan membantu meningkatkan daya tarik dan keterbacaan buku. Ini termasuk pemilihan font yang sesuai, pemformatan teks, penggunaan grafik dan ilustrasi, serta pemilihan warna yang memadai.

5. Pengujian Bacaan: Sebelum publikasi, buku akan direview oleh pihak yang berkompeten, seperti editor, akademisi, atau praktisi HAM untuk memastikan kualitas dan akurasi isi. Koreksi terakhir akan dilakukan untuk mengatasi kesalahan atau kekurangan yang mungkin terlewat selama tahap penyusunan sebelumnya.
6. Proofreading dan Penyuntingan Akhir: Setelah revisi selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan proofreading dan penyuntingan akhir. Penulis harus memeriksa tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan kesalahan kecil lainnya yang mungkin terlewatkan. Jika memungkinkan, menggunakan jasa penyunting profesional dapat membantu memastikan bahwa buku bebas dari kesalahan dan siap untuk dicetak atau dipublikasikan.
7. Penyelesaian dan Publikasi: Setelah semua tahap di atas selesai, buku akan dipublikasikan dalam bentuk cetak atau digital. Dalam era digital saat ini, buku juga dapat dipublikasikan melalui platform online atau ebook untuk mencapai audiens yang lebih luas. Promosi dan penyebaran buku akan dilakukan melalui saluran yang sesuai, seperti penerbit, toko buku, situs web, media sosial, atau acara-acara terkait HAM.

3. TIMELINE RENCANA PENULISAN BUKU

Timeline rencana penulisan buku adalah jadwal yang menggambarkan langkah-langkah dan waktu yang diestimasikan untuk menyelesaikan penulisan buku. Timeline ini membantu penulis dalam mengatur dan mengelola proses penulisan agar sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Nama Penulis : Djamaludin, S.H., M.H. & Iryana Anwar, S.H., M.H.

Judul Buku : Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional

No	Kegiatan	Deadline (Target) Pengerjaan (Tgl,Bulan,Tahun)	Keterangan
1	Penyusunan Rencana Awal	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi literatur dan sumber yang relevan tentang HAM Internasional dan Nasional - Mengumpulkan dokumen-dokumen hukum dan kebijakan terkait HAM

No	Kegiatan	Deadline (Target) Pengerjaan (Tgl,Bulan,Tahun)	Keterangan
2	Penelitian	2 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penelitian lapangan jika diperlukan, seperti wawancara dengan pakar HAM atau pemangku kepentingan terkait - Membuat kerangka utama buku berdasarkan hasil penelitian - Menentukan Bab-Bab dan sub bab berdasarkan
3	Penulisan Bab-Bab	3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai menulis setiap bab dan subbab berdasarkan kerangka dan isi yang telah ditentukan - Menyusun paragraf pendahuluan, pengembangan argumen, dan kesimpulan untuk setiap bab - Memperhatikan kerapian bahasa, kesesuaian gaya penulisan, dan penggunaan contoh yang relevan - Membuat daftar referensi dengan rapi berdasarkan sumber yang digunakan dalam penulisan - memastikan format referensi dengan gaya penulisa yang dipilih (misalnya, APA, MLA, atau Chicago).

No	Kegiatan	Deadline (Target) Pengerjaan (Tgl,Bulan,Tahun)	Keterangan
4	Desain dan Tata Letak	2 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang desain buku, termasuk pemilih font, tata letak teks, penggunaan grafik atau ilustrasi, dan pemilihan warna yang sesuai - Mengintegrasikan isi buku ke dalam desain dengan cara menarik dan memudahkan pembaca.
5	Peninjauan dan Penyuntingan	2 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Mereview kembali setiap bab dan subbab untuk memastikan kejelasan, konsistensi, dan koherensi. - Mengoreksi kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. - Memeriksa dan memastikan keakuratan informasi serta pembenaran argumen yang disampaikan.
6	Pengerjaan Revisi	2 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Mereview kembali setiap bab dan subbab untuk memastikan kejelasan, konsistensi, dan koherensi. - Mengoreksi kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. - Memeriksa dan memastikan

No	Kegiatan	Deadline (Target) Pengerjaan (Tgl,Bulan,Tahun)	Keterangan
			keakuratan informasi serta pembenaran argumen yang disampaikan.
7	Proofreading dan Penyuntingan Akhir	2 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan umpan balik dari pihak yang berkompeten, seperti editor, akademisi, atau praktisi HAM - Melakukan koreksi dan perbaikan terakhir berdasarkan saran dan masukan yang diberikan
8	Penyelesaian dan Penyerahan Naskah	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Memilih platform publikasi yang sesuai seperti cetak, digital, atau kombinasi keduanya - Melakukan promosi buku melalui saluran yang relevan, seperti penerbit, toko buku, situs web, media sosial, dan acara-acara terkait HAM.

4. KERANGKA DAN STRUKTUR BUKU

Kerangka dan struktur buku merupakan komponen penting dalam penulisan buku yang membantu menyusun dan mengatur konten secara sistematis. Kerangka dan struktur ini memberikan arahan dan alur yang jelas bagi pembaca serta membantu penulis dalam menyampaikan informasi secara teratur.

Nama Penulis : Djamaludin, S.H., M.H. dan Iryana Anwar, S.H., M.H.

Judul Buku : Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional

No	Bab/Bagian	Judul Bab	Jumlah Halaman
1	Kata Pengantar	Kata Pengantar	2
2	Bab I	Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia	40
3	Bab II	Pengantar Internasional Standar Hak Asasi Manusia	24
4	Bab III	Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional	26
5	Bab IV	Melindungi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara	37
6	Bab V	Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sistem Internasional	31
7	Bab VI	Hak Non-Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan	26
8	Bab VII	Hak Non Warga Negara: Pekerja Migran dan Orang Yang Diperdagangkan	26
9	Bab VIII	Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum	22
10	Bab IX	Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia	24
11	Bab X	Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik	21
12	Bab XI	Pengadilan Hak Asasi Manusia	20
13	Bab XII	Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia	51
14	Bab XIII	Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945	25
15	Bab XIV	Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan	15
16	Daftar Pustaka	Daftar Pustaka	11
17	Indeks	Indeks	8

Contoh Kerangka/Cuplikan Naskah Buku

Cuplikan naskah buku.

SAMBUTAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I DASAR-DASAR HAK ASASI MANUSIA

1. Apa Itu Hak Asasi Manusia?
 - 1.1. Menjadi Manusia
 - 1.2. Hak Asasi Manusia
 - 1.3. Dasar-dasar Hak Asasi Manusia
2. Karakteristik Dan Konsep Dasar Dalam Hak Asasi Manusia
 - 2.1. Keuniversalan
 - 2.2. Bersifat Permanen
 - 2.3. Tidak Dapat Dicabut
 - 2.4. Bermartabat
 - 2.5. Kesetaraan
3. Hukum Hak Asasi Manusia: Hak Dan Kewajiban
 - 3.1. Peraturan Hukum
 - 3.2. Tugas Hak Asasi Manusia
 - 3.3. Perlindungan Vertikal Dan Horisontal
 - 3.4. Kewajiban Negara: 'Menghormati, Melindungi, Memenuhi', dan 'Mendorong, Melindungi, dan Mencegah
4. Kategori Hak
 - 4.1. Pemisahan Dan Penyatuan Kategori Hak
 - 4.2. VDPA: *Vienna Declaration and Programme of Action*
5. Mengapa Mempelajari Hak Asasi Manusia?
 - 5.1. Pendidikan Hak Asasi Manusia Adalah Hak Asasi Manusia
 - 5.2. Melindungi Yang Rentan
 - 5.3. Hak Asasi Manusia Memberikan Pemahaman Regional
 - 5.4. Pendidikan Hak Asasi Manusia Menambah Nilai Pengetahuan Lainnya

BAB II PENGANTAR INTERNASIONAL STANDAR HAK ASASI MANUSIA

1. Hukum Internasional Publik: Dasar-Dasar
2. Sumber Hukum Internasional
3. Latar Belakang Perkembangan Standar Hak Asasi Manusia Internasional
 - 3.1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)
4. Membuat Perjanjian: Sebuah Tinjauan
 - 4.1. Pengecualian dan Pemahaman
5. Mengapa Negara Meratifikasi Perjanjian Yang Membebani Mereka Dengan Kewajiban Hukum?

BAB III PERJANJIAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

1. ICCPR
2. Hak Dalam ICCPR
 - 2.1. Hak Dalam ICCPR
 - 2.2. Non Diskriminasi
 - 2.3. Hak Untuk Hidup
 - 2.4. Hak Hukum (pasal 9, 10, 14, 26)
 - 2.5. Kebebasan Bergerak (pasal 12)
 - 2.6. Kebebasan Bergerak (Pasal 18)
 - 2.7. Kebebasan Berekspresi (Pasal 19)
 - 2.8. Hak Untuk Menikah dan Memiliki Anak (Pasal 23)
 - 2.9. Hak Berserikat dan Berkumpul (Pasal 21, 22)
 - 2.10. Hak Memilih (Pasal 25)
3. Batasan Hak Sipil Dan Politik
 - 3.1. Batasan Untuk Semua Hak
 - 3.2. Pembatasan Hak Khusus yang Dibuat Oleh Pemerintah
 - 3.3. Derogasi Dalam Keadaan Darurat Publik
4. ICESCR
 - 4.1. Realisasi Progresif
 - 4.2. Keadilan
5. Hak Di ICESCR
 - 5.1. Hak Ekonomi
 - 5.2. Hak Sosial
6. Budaya Dan Hak Asasi Manusia

BAB IV MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI ASIA TENGGARA

1. Status Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara
2. Implementasi HAM Domestik
 - 2.1. Standar Internasional ke Dalam Hukum Domestik
 - 2.2. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Asia Tenggara
3. Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional
 - 3.1. Kelahiran NHRI
 - 3.2. Jenis NHRI dan Fungsinya
 - 3.3. Kegiatan NHRI
 - 3.4. Memantau Standar NHRI
 - 3.5. Keterbatasan NHRI
4. Mekanisme Daerah
 - 4.1. Rezim Hak Asasi Manusia Regional: Eropa, Amerika, dan Afrika
 - 4.2. Tinjauan Sistem Regional
5. Mekanisme HAM ASEAN
6. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - 6.1. Kegiatan LSM

BAB V PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN SISTEM INTERNASIONAL

1. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Lebih Luas
 - 1.1. Dewan Keamanan
 - 1.2. Majelis Umum
 - 1.3. Mahkamah Internasional
 - 1.4. Sekretariat PBB
 - 1.5. Badan Lainnya
2. Badan Hak Asasi Manusia PBB
 - 2.1. Badan Piagam: Dewan Hak Asasi Manusia
 - 2.2. Tindakan Dewan Hak Asasi Manusia untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia
3. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCHR)
4. Badan Perjanjian

BAB VI HAK NON-WARGA NEGARA: PENGUNGSI DAN TANPA KEWARGANEGARAAN

1. Migrasi di Asia Tenggara
 - 1.1. Terminologi
 - 1.2. Konteks Sejarah dan Ekonomi terhadap Migrasi di Asia Tenggara

2. Empat Kategori Hak Non-Warga Negara: Sebuah Tinjauan
 - 2.1. Kesenjangan dan Tumpang Tindih dalam Perlindungan Hukum
3. Konvensi Pengungsi
 - 3.1. Defenisi Pengungsi
 - 3.2. Standar Konvensi Pengungsi
4. Populasi dan Perlindungan Pengungsi di Asia Tenggara
 - 4.1. Organisasi Pengungsi: UNCHR
5. Orang Tanpa Kewarganegaraan
 - 5.1. Mendefenisikan Tanpa Kewarganegaraan
 - 5.2. Pelanggaran Hak-hak Tanpa Kewarganegaraan
 - 5.3. Konvensi Tanpa Kewarganegaraan
 - 5.4. Penyebab Kewarganegaraan
 - 5.5. Tindakan untuk Menghilangkan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

BAB VII HAK NON-WARGA NEGARA: PEKERJA MIGRAN DAN ORANG YANG DIPERDAGANGKAN

1. Buruh Migran
2. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (ICRMW)
 - 2.1. Pengertian Pekerja Imigran
 - 2.2. Hak-hak Buruh Migran di ICRMW
 - 2.3. Tantangan Bagi ICRMW
 - 2.4. Alasan-alasan untuk Rendahnya Ratifikasi
3. Pelanggaran Hak Pekerja Migran
 - 3.1. Tindakan Pemerintah yang dapat Melindungi Hak-Hak Buruh Migran
 - 3.2. Organisasi Pekerja Migran
4. Orang Yang Diperdagangkan
 - 4.1. Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan Anakn, 2003 (Protokol Palermo)
 - 4.2. Defenisi Perdagangan
 - 4.3. Elemen Hak Asasi Manusia dalam Protokol Trafficking
5. Tantangan Untuk Mengidentifikasi Orang-orang Yang Diperdagangkan
 - 5.1. Tanggapan LSM

BAB IX HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM

1. Pengertian Negara Hukum

2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum
3. Unsur-Unsur Negara Hukum
4. Konsep Negara Hukum Indonesia
5. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum

BAB X HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA

1. Peran Konstitusi
2. Pengujian Konstitusi
3. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia
4. Alasan Hak Asasi Manusia Dimuat Dalam Konstitusi
5. Hak Asasi Manusia Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia
6. Perjalanan Sejarah HAM Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kaitan Hak Asasi Manusia Dengan Hukum
8. Pelanggaran Dan Proses Peradilan HAM Internasional

BAB XI HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK

1. Hak Asasi Manusia
 - 1.1. Generasi-Generasi Hak Asasi Manusia (HAM)
 - 1.2. Transisi Politik Menuju Demokrasi
2. Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik
 - 2.1. Kasus Pembunuhan Steven Biko Di Afrika Selatan
 - 2.2. Makna Keadilan dalam Proses Rekonsiliasi.
 - 2.3. Perspektif Hukum Internasional
3. Pengalaman Beberapa Negara
 - 3.1. Beberapa Negara Amerika Latin
 - 3.2. Beberapa Negara Non-Amerika Latin

BAB XII PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Tempat Kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia
6. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

BAB XIII LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

1. Pengantar
2. Polisi

3. Kejaksaan
4. Pengadilan
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
6. Mahkamah Konstitusi
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
9. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)
10. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - 11.1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
 - 11.2. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
 - 11.3. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
 - 11.4. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)
12. Pers

BAB XIV LAHIRNYA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Amandemen I
2. Amandemen II
3. Amandemen III
4. Amandemen IV
5. Prosedur Perubahan Konstitusi
6. Bagaimana Mekanisme Mengubah UUD 1945?
7. Latar Belakang Amandemen UUD 1945
8. Substansi Hasil Dari Amandemen UUD 1945
9. Kekurangan Dalam Amandemen UUD 1945
10. Hakikat Dan Makna Pengesahan UUD 1945
11. Proses Pergantian Dan Perubahan
12. Peranti Bernegara Yang Harus Dikawal

BAB XV MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Hak Asasi Manusia
2. Konstitusi
3. Perdebatan Oleh Pendiri Bangsa (UUD Tahun 1945)
4. Euforia Pengakuan HAM (Konstitusi RIS 1949 Dan UUDS 1950)

5. Anomali Kekuasaan Dan HAM (UUD Tahun 1945)
6. Babak Baru HAM Dalam Era Reformasi (UUD Tahun 1945 Amandemen (I-IV))

DAFTAR PUSTAKA

INDEKS

BIOGRAFI PENULIS

5. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Rencana anggaran dan biaya penulisan buku adalah perencanaan yang melibatkan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam proses penulisan, penerbitan, dan pemasaran buku. Menyusun rencana anggaran yang baik membantu penulis untuk mengelola keuangan secara efektif dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan bijak.

A. Bahan Habis Pakai

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tidak ada biaya yang signifikan dalam kategori ini					
dst						
Sub-Total (Rp)						0

B. Alat Penunjang (Aset)

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tidak ada biaya yang signifikan dalam kategori ini					
dst						
Sub-Total (Rp)						0

C. Penelitian

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Akses internet dan basis data	1	1	1	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
Sub-Total (Rp)						Rp.500.000,-

D. Pengeditan dan Proofreading

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jasa pengeditan teks	1	1	1	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-
2	Jasa Proofreading	1	1	1	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
Sub-Total (Rp)						Rp.2.500.000,-

E. Desain dan Layout

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jasa desain sampul buku	1	1	1	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-

2	Jasa tata letak buku	1	1	1	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
					Sub-Total (Rp)	Rp.2.500.000,-

F. Cetak dan Produksi

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya cetak buku (estimasi 50 eksemplar)	50	50	50	Rp.50.000,-	Rp.2.000.000,-
					Sub-Total (Rp)	Rp.2.000.000,-

G. Distribusi dan Pengiriman

No	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya kemasan dan pengiriman buku (estimasi 50 eksemplar)	50	50	50	Rp.10.000,-	Rp.500.000,-
					Sub-Total (Rp)	Rp.500.000,-

Total Biaya Sub-Total (Rp) Rp.7.500.000,-

Terbilang *Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*

Dalam rencana anggaran ini, prioritas diberikan pada pembelian bahan habis pakai seperti buku referensi, yang diperlukan selama proses penelitian. Tidak ada biaya yang signifikan dalam kategori alat penunjang aset. Selanjutnya, anggaran dialokasikan untuk penelitian, pengeditan dan proofreading, serta desain dan layout untuk memastikan kualitas dan tampilan buku yang baik. Biaya cetak dan produksi mencakup biaya cetak buku dalam jumlah tertentu. Terakhir, biaya distribusi dan pengiriman meliputi kemasan dan pengiriman buku ke tujuan yang ditentukan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka adalah bagian penting dalam laporan penelitian yang mencantumkan semua sumber yang dikutip atau dirujuk dalam penelitian. Daftar ini disusun sesuai dengan format penulisan yang sesuai dengan *Chicago Manual of Style*, yang merupakan salah satu format penulisan referensi yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah. Untuk memastikan konsistensi dan kemudahan pengelolaan referensi, disarankan menggunakan *Mendeley Reference Manager*, sebuah alat manajemen referensi yang populer dan mudah digunakan.

- A, Gallagher. *The international law of human trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Ed. 1, Cet. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Abdullah, Rozali, dan Syamsir. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Accreditation, ICC. "Komite Koordinasi Internasional untuk Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (ICC)." ICC Accreditation, 2021. <https://nhri.ohchr.org/EN/ICC/Pages/Accreditation.aspx>.
- Affiah, Neng Dara. *Rekam juang komnas perempuan : 16 tahun menghapus kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.
- Alston, Philip. "Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goals." *Human Rights Quarterly* 27, no. 3 (2005): 755–829. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/hrq.2005.0041>.
- Alston, Philip, dan Ryan Goodman. *International Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana: Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Assembly, United Nations General. "The Paris Principles: Principles Relating to the Status of National Institutions." United Nations General Assembly, 1993. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/statusofnationalinstitutions.aspx>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara / Jimly Asshiddiqie*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asyiah, Nur. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Atmasasmita, Romli, Agus Takariawan, dan Meliala Aman Sembiring. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2001.

- B.S, Chimni. "The geopolitics of refugee studies: A view from the South." *Journal of refugee studies* 13, no. 4 (2000): 350–74.
- Benedek, Wolfgang. *Understanding Human Rights: Manual on Human Rights Education*. Diedit oleh Wolfgang Benedek. 3 ed. Graz: Intersentia, 2012.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Yunani Klasik : Relevansi Untuk Abad XXI*. Diedit oleh Ino Hartono. Yogyakarta: Jalasutra, 2016.
- Burdekin, Brian. "Report of the National Inquiry into the Human rights of People with Mental Illness." *The International Journal of Human Rights* 16, no. 8 (2012): 1143–59. <https://humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/publications/report-national-inquiry-human-rights-people-mental-illness>.
- Catherine Renshaw. *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalising human rights in Southeast Asia*. Routledge: Cambridge University Press, 2017.
- Clapham, Andrew. *Human Rights: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- CSIS. *Clipping CSIS 2003*. Jakarta: CSIS, 2003.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. UU Nomor 48 Tahun 2009 (2009).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 22 (2002).
- Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H. *Negara hukum & mahkamah konstitusi : (perwujudan negara hukum yang demokratis melalui wewenang mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang)*. Cet. III. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019.
- Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., dan M.H. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H. *Dinamika negara hukum*. Diedit oleh Risty Mirsawati. Cet.1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Eide, Asbjørn, Catarina Krause, dan Allan Rosas. *Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook*. 2 ed. South America: kluwer Academic Publisehers, 2001.
- Elsam. "Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat." Elsam, 2022. <https://www.elsam.or.id/>.
- Fajar, Mukhti. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Forsythe, David. *Human Rights in International Relations*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 1999.
- Glendon, Mary Ann. *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*. New York: Random House Trade Paperbacks, 2001.
- Goodman, Ryan, dan Derek Jinks. *Socializing States: Promoting Human Rights through International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2013. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199300990.001.0001>.
- Goodwin-Gill, dan McAdam J. *The refugee in international law*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

- H. Muhammad Tahir Azhari. *Negara hukum : suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Hathaway, Oona. "The Internationalists: How A Radical Plan to Outlaw War Remade the World." *American Journal of International Law* 112, no. 2 (2018): 330–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/ajil.2018.31>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- HREA. "Human Rights Education Association (HREA)," n.d. <http://www.hrea.org/>.
- Indonesia. UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap (pertama 1999-keempat 2002) dilengkapi dengan Piagam Jakarta (2002).
- Institutions, Southeast Asia National Human Rights. "Forum Asia Pasifik Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional." Southeast Asia National Human Rights Institutions, 2021. <https://www.asiapacificforum.net/resources/national-human-rights-institutions/southeast-asia/>.
- Ishay, Micheline. *The History of Human Rights*. California: University of California Press, 2004.
- Ishay, Micheline, Francis, dan Taylor. *The Human Rights Reader: Major Political Essays, Speeches, and Documents from the Bible to the Present*. Routledge. New York: Routledge, 2007.
- J.C. Hathaway. *The law of refugee status*. Butterworths: Butterworths, 1991.
- Jailani, Muhammad, dan Lalu Adnan Ibrahim. *Mengenal Pengadilan Kriminal Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Diedit oleh Sarkawi. Mataram: Pustaka Bangsa, 2016.
- Jaya, Eko. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Eko Jaya, 2008.
- Joseph, Sarah, dan Melissa Castan. *The International Covenant on Civil and Political Rights (3rd Edition): Cases, Materials, and Commentary*. 3 ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. <https://doi.org/10.1093/law/9780199641949.001.0001>.
- Kandedes, lin, dan Sidratahta. *Militer dan Demokrasi: Pemikiran Letjen (Purn) Agus Widjojo tentang Peran TNI Dalam Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia*. Lampung: Fakta Press IAIN Raden Intan Lampung, 2013.
- Koh, Harold Hongju. *The Trump Administration and International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780190912185.001.0001>.
- Komnas HAM RI. "Tentang Komnas HAM." Komnas HAM RI, 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>.
- KontraS. "KontraS." KontraS, 2022. <https://kontras.org/>.
- Lauren, Paul Gordon. *The Evolution of International Human Rights: Visions Seen*. 3 ed. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2011.
- Maertus, Julie. *The Role of Human Rights in Peacebuilding.*" *In The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations*. Diedit oleh Joachim Koops, Norrie MacQueen, Thierry Tardy, dan Paul D. Williams. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." MKRI, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.

- Majda El-Muhtaj. *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002*. 2 Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mas, Marwan. "Analisis Kelemahan Dan Kelebihan Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," 2018.
- Mazower, Mark. *Mark Mazower. Governing the World. The History of an Idea*. London: Penguin Press, 2012.
- Morsink, Johannes. *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1999.
- Muntarhorn V. *The status of refugees in Asia*. Martinus Nijhoff: Martinus Nijhoff Publishers, 1992.
- Nandini, Rizkyana Tri, Anita Trisiana, dan Dina Yeti Utami. "Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn* 8, no. 1 (2021): 40–48. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>.
- Ngastawa, I Ketut. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-017/Puu-I/2003 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Dipilih." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 4 (2015): 757–69. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i04.p15>.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Boston: Martinus, 2004.
- Nowak, Manfred, Kehl, Strasbourg, dan Arlington VA. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2204221>.
- OHCHR. "Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)," n.d. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx.
- . "the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)," n.d. <http://www.ohchr.org/>.
- OHCR. "OHCR," 2022. https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage.
- Ombudsman RI. Undang undang republik indonesia nomor 37 tahun 2008 ombudsman republik indonesia : undang undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik / ombudsman RI 2019 (2019).
- Organization., International Labour. "Employment practices and working conditions in the Thai fishing sector." International Labour Organization., 2013. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_248058.pdf.
- Petcharamesree, Dr. Sripapha. "The Establishment of a National Human Rights Commission in Thailand: Progress and Challenges." *Asian Journal of Comparative Law* 12, no. 1 (2017): 105–23. https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-law/volume/69B180FA177AD241AA93329AA3344144?sort=canonical.position%253Aasc&pageNum=2&searchWithinIds=69B180FA177AD241AA93329AA3344144&productType=JOURNAL_ARTICLE&template=cambridge-core%252.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*. Diedit oleh Ihsan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- r. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M., dan M.Hum. Kristian, S.H. *Perkembangan konsep negara hukum dan negara hukum Pancasila*. Diedit oleh M.Hum. Oktavianus Hartono, S.H. Cet.1. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Rachmayani, Dewi. "Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum." *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. c (2018): 45–60.
- Ramcharan, Bertrand. *Human Rights and Peace: A Practitioner's Perspective.* In *Human Rights, Peace and Justice in Africa: A Reader*. Diedit oleh Solomon A. Dersso dan Wafula Okumu. Addis Ababa: Institute for Security Studies, 2005.
- Redaksi, Tim. *KUHP dan KUHP*. Surabaya: Kesindo Utama, 2012.
- Rehman, Javid. *International Human Rights Law: A Practical Approach*. London: Longman, 2003.
- Said, Muhtar. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Cet. 1. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Samuel Moyn. *The Last Utopia: Human Rights in History*. Cambridge: Harvard University Press, 2010.
- Schutter, Olivier de. *Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights*. Louvain: Catholic University of Louvain, 2013.
- Sepúlveda, Magdalena, Theo van Banning, Gudrún D. Gudmindsdóttir, Christine Chamoun, dan Willem J. M. van Genugten. *Human Rights Reference Handbook*. 3 ed. Ciudad Colon Costa Rica: University of Peace, 2004.
- Simbolon, Laurensius Arliman. *Kedudukan KPAI dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Simmons, Beth A. *Mobilizing Human Rights: International Law in Domestic Politics*. Philadelphia: Cambridge University Press, 2009.
- Smith, Rhona K. M. *International Human Rights Law*. 10 ed. Oxford: Oxford University Press, n.d.
- Ssenyonjo, Manisuli. *Economic, Social and Cultural Rights in International Law*. Diedit oleh Eibe Riedel, Giles Giacca, dan Christophe Gelay. Oxford University Press, 2014.
- Stephan, Alfred. *Militer dan Demokratisasi: Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Lain*. Diterjemahkan oleh Bambang Cipto. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1996.
- Sudjana, Eggi. *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*. Diedit oleh M. Fachry. Cet.1. Bogor: Yayasan As-Syahidah, 1998.
- Sumolang, Duta Setiawan. "Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Administratum* VII, no. 1 (2019): 87–93.
- Tan, Hsien-Li. *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- UMN. "UMN," n.d. <http://www1.umn.edu/humanrts>.
- UNHCR. "UNHCR," n.d. <https://www.unhcr.org/>.

- Wagiman, Wahyu, Zainal Abidin, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006.
- Wahyuningrum, Yuyun. *ASEAN Regional Mechanisms in Promoting and Protecting the Rights of Women and Children: An Overview*. Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2013.
- Walhi. "Walhi." Walhi, 2022. <https://www.walhi.or.id/>.
- Watch., Human Rights. "From the tiger to the crocodile: Abuse of migrant workers in Thailand." Human Rights Watch., 2009. <https://www.hrw.org/report/2009/01/12/tiger-crocodile/abuses-against-migrant-workers-thailand>.
- . "Maid to order: Ending abuses against migrant domestic workers in Singapore." Human Rights Watch., 2011. <https://www.hrw.org/report/2011/10/31/maid-order/ending-abuses-against-migrant-domestic-workers-singapore>.
- Weiss, Thomas. *Global Governance and Human Rights.* In *Global Governance and Human Rights: Challenges, Institutions and Practices*. Diedit oleh Darren J. O'Byrne dan Mark A. J. Partridge. Cham: Springer, 2016.
- Wikipedia. "Pers Indonesia." Wikipedia, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Pers_Indonesia.
- Winarto. "Pers dan Dinamika Politik Indonesia." *Jurnal Dewan Pers* 21 (2020): 68–77.
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kedua., 2015.
- Yanto. *Kajian Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia*. Cet. 1. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- YLBHI. "Sejarah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia." YLBHI, 2022. <https://ylbhi.or.id/sejarah/>.
- Yulianta Saputra. "Sejarah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia." *UGM*. Yogyakarta, 2018. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/sejarah-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-di-indonesia/>.

7. IDENTITAS PENGUSUL

Nama	Peran	Perguruan Tinggi	Program Studi	Bidang Fokus Riset	Bidang Tugas	ID Sinta
Djamaludin, S.H., M.H.	Penulis 1	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua	Hukum	Hak Asasi Manusia	Pidana	6834192
Iryana Anwar, S.H., M.H.	Penulis 2	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua	Hukum	Hak Asasi Manusia	Pidana	6683600

8. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENULIS

A. Identitas Penulis

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	: Djamaludin, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	: Laki-laki
3	NIP/NIK/Identitas lainnya	: 9106010505940003
4	NIDN	: 1406059401
5	Tempat dan Tanggal Lahir	: Biak, 06 Mei 1994
6	E-mail	: djamaludin@stihbiak.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	: 081344122256
8	Nama Institusi Tempat Kerja	: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
9	Alamat Kantor	: Jl. Petrus Kafiar Biak (Belakang RSUD Biak/PT.BIP) Brambaken, Samofa, Biak, Papua
10	Nomor Telepon/Faks	: (0981) 2911909

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	STIH Biak-Papua	STIH Biak-Papua	-
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	-
Tahun Masuk-Lulus	2013-2017	2020-2022	-
	Peranan Intelijen	Peran Kejaksaan	-
	Kejaksaan Negeri	Dalam	
	Biak Dalam	Implementasi	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengungkapan	Kebijakan	
	Dugaan Tindak	<i>Restorative Justice</i>	
	Pidana Korupsi	Sebagai Upaya	
		Penyelesaian	
		Tindak Pidana	
	Dr. Muslim	Dr. Muslim	-
Nama Pembimbing/Promotor	Lobubun, S.H., M.H.	Lobubun, S.H., M.H.	

C. Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal yang Relevan dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume / Nomor / Tahun
1	Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Maslahah Mursalah	Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam	23 Nomor 2 Juli – Desember 2022

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) yang Relevan dalam 5 Tahun Terakhir

No	Pemakalah Seminar Ilmiah (<i>Oral Presentation</i>)	Pemakalah Seminar Ilmiah (<i>Oral Presentation</i>)	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Pengantar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara (menerjemahkan Buku)	2022	417	Yayasan Kyadiren

F. HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-

G. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Piagam Penghargaan atas dedikasi sebagai "Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Tahun 2021"	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	2021